

PERANAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN

(Suatu Studi Terhadap UPTD Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat)

OLIFIA PURA

ABSTRACT : *Olifia temple under the guidance of Drs. M.S. Pangkey, M.Si as Main Supervisor and Drs. A.J. Rorong, M.Si as Supervising Companion, with Thesis Title: "The Role of Governmen in Improving Education District " A Study Of UPTD West Halmahera District Lolod. In this study, there are some issues that are a barrier to improving the quality and the quality of education, especially in the West Halmahera District Loloda. The problem - the problem in question is the lack of understanding of the education system so that the responsibility for improving education in both government and the community is very low.*

Another problem as well as the education budget, curriculum, facilities, teachers, and other factors such as the principles of governance. All of this has not been implemented by regulations. The method used in this research is qualitative method using qualitative descriptive format. This research was conducted in the District of West Halmahera Loloda particularly in the government's efforts to improve the quality of education through UPTD. To get the expected results, then surely researchers needed a source or informant, by him that the researcher can determine the informants through a sample taken from the part of the population.

Research variables consist of the independent variables and the dependent variable. Independent Variable is a role of government, while the Dependent Variable is improving education. The next step in this research using the instrument observation data collection, interviews, and through questionnaires. This study has the objective is to gain an overview of the role of government in improving education, which is expected to also get the benefit. The benefits of this research are theoretical benefits and practical benefits. Based on the results of the research can be judged that the government's role in improving education in the sub-districts of West Halmahera Loloda can work well although there are still many obstacles in the field and also the limitation of infrastructure of education, so I can say that the success of the government's role in running the school district has been running well although not quite up to at perform.

PENDAHULUAN

Maju tidaknya sebuah bangsa, ditentukan oleh maju tidaknya suatu pendidikan. Pendidikan adalah penentu sebuah bangsa menjadi maju, berkembang dan berkualitas. Bangsa yang berkualitas adalah bangsa yang manusianya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri,

maju, tangguh, cerdas, kreatif, trampil, berdisiplin, beretos kerja, bertanggung jawab, produktif, dan profesional serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan yang dapat menjadikan bangsa yang berkualitas dan berakhlak karismah tidak dapat dilepaskan dari peran serta pemerintah dan guru sebagai pelaku dan pemegang kunci keberhasilan sebuah pendidikan. Olehnya

itu, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam kemajuan dari berbagai bidang. Artinya kemajuan yang berakibatkan pada pengembangan potensi kecerdasan manusia (keterampilan intelektual) yang berkembang secara optimal.

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan Nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia (WNI) untuk berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah-ubah dan terus mengalami perkembangan.

Pemerintah Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat telah berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang merupakan langkah awal dalam membangun dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkualitas, namun upaya yang dilakukan pun masih mendapat kendala karena dilihat pada kualitas guru-guru itu masih rendah, kemudian sarana dan prasarana juga masih sangat kurang seperti penyediaan buku-

buku, LKS, dan sarana lainnya. Untuk itu sangat dibutuhkan peran seluruh komponen masyarakat dan stakeholders, lembaga-lembaga swasta, dan terutama peran Pemerintah Daerah melalui Pemerintah Wilayah Kecamatan agar bisa melakukan penataan kembali secara bersama-sama untuk merumuskan sistem pendidikan yang dijalankan di Kecamatan Loloda.

Sehubungan dengan itu maka untuk memenuhi harapan tersebut, terutama yang berkenaan dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan oleh pemerintah, maka penulis ingin mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam hal meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan demikian, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Peranan Pemerintah Kecamatan Dalam Meningkatkan Pendidikan (Suatu Studi Terhadap UPTD Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat)”.

Secara etimologi kata “peranan” berasal dari kata “peran” yang berarti pemain sandiwara. Kemudian kata ini ditambah dengan akhiran “an” yang berarti sesuatu yang menopang pimpinan terutama atau karena suatu hal atau peristiwa (W.J.S. Poerdaminta, 1986 : 283). Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Peranan (role) adalah merupakan aspek dinamis dan

status, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan. Sehingga antara status dan peranan tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain, demikian pula sebaliknya dimana tidak ada peranan tanpa kedudukan atau tidak ada kedudukan tanpa peranan.

Pada dasarnya pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan pihak swasta, pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis (Dharma Setyawan Salam, 2007:34).

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu ilmu

pengetahuan, karena memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas).

Sejalan dengan hal tersebut pada konsep-konsep sebelumnya, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi secara legalitas diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapat pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosiokultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi, dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam rangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama Camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mengendalikan diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, bangsa dan negara.

Menurut Kartini Kartono (1997:133) pendidikan dalam pengertian

khusus berarti upaya terencana dan sistematis untuk membawa anak didik ke tujuan-tujuan pendidikan tertentu dan kedewasaan, sedangkan dalam pengertian luas pendidikan dapat diartikan sebagai usaha untuk memberikan pengetahuan, wawasan, keterampilan, keahlian dan pengalaman guna mengembangkan bakat dan kepribadian individu/manusia.

Apabila reformasi di tuntutan dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, maka aspek pendidikan merupakan salah satu agenda yang perlu di reformasi. Sebab pendidikan disadari sebagai salah satu aspek yang penting dalam mempersiapkan generasi masa depan bangsa. Menurut John Dewey dalam Pasandaran (2004 : 5), menunjukan bahwa apa yang disebut “New Education” berarti pendidikan tidak dapat diisolasi dari kehidupan masyarakat. Apa yang di tulis oleh Dewey adalah sangat relevan untuk kita renungkan dewasa ini. Nilai-nilai reformasi untuk membentuk masyarakat yang lebih demokratis dapat terwujud apabila pendidikan itu sendiri merupakan bagian dari demokratisasi. Platform reformasi pendidikan nasional harus sesuai dengan visi reformasi serta sesuai dengan amanat Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 1945 yaitu untuk mewujudkan

masyarakat yang cerdas. Masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang Pancasilais yang memiliki cita-cita dan harapan masa depan, demokratis dan beradab, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan bertanggung jawab, berakhlak mulia, tertib dan sadar hukum, kooperatif dan kompetitif, serta memiliki kesadaran dan solidaritas antar generasi dan antar bangsa.

Beberapa tahun terakhir, manajemen pendidikan nasional banyak memperoleh perhatian. Diakui bahwa lebih dari 32 tahun pendidikan nasional menganut sistem sentralistik sesuai dengan pijakan UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989. Seiring dengan tuntutan reformasi pendidikan, maka manajemen pendidikan nasional perlu sebuah paradigma baru yang menganut sistem desentralistik. Atas tuntutan tersebut akhirnya lahirlah UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Orientasi manajemen pendidikan nasional dalam UU tersebut bersifat desentralistik. Walaupun harus diakui bahwa kedua sistem manajemen pendidikan nasional, baik yang bersifat sentralistik maupun desentralistik memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Di satu sisi, tuntutan reformasi pendidikan menghendaki sistem desentralisasi pendidikan, tetapi di sisi lain, tuntutan terhadap sistem pendidikan

nasional yang semakin meningkatkan mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) makin gencar pula dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat maupun pemerintah. Sedangkan menyangkut “quality control” dari suatu sistem meminta penyelenggaraan yang lugas, efisien, dan oleh sebab itu, cenderung kepada sentralisasi.

Salah satu model desentralisasi pendidikan adalah Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management). Hal ini dapat diartikan sebagai pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua unsur kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah.

Menurut Pasandaran, (2004 : 31-32), Kurikulum adalah instrumen pendidikan yang sangat penting dan strategis dalam menata pengalaman belajar siswa, dalam meletakkan landasan-landasan pengetahuan, nilai, keterampilan, dan keahlian dan dalam membentuk atribut kapasitas yang di perlukan untuk menghadapi perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Saat ini, memang telah dilakukan upaya-upaya untuk semakin

meningkatkan relevansi kurikulum dengan melakukan revisi dan uji coba kurikulum. Uji coba tersebut didasarkan pada pendekatan, yaitu:

1. kapasitas profesional. Penguasaan aspek kognitif dalam bentuk kemampuan,
2. Penguasaan aspek afektif yang lebih komprehensif, dan
3. Penguasaan aspek keterampilan dalam bentuk

Akan tetapi di pihak lain terdapat masalah yang menghadang yaitu masalah kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama tenaga kependidikan baik guru-guru, teknisi, laboran, konselor, administrator, yang dapat mendukung pengembangan kurikulum. Masalah berikutnya adalah dukungan finansial dan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan. Masalah-masalah tersebut sangat strategis untuk di selesaikan karena akan sangat mempengaruhi implementasi kurikulum di sekolah.

Dalam rangka desentralisasi di bidang pendidikan, model ini mulai dikembangkan untuk di terapkan. Diproposisikan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah akan memperkuat rujukan preferensi nilai yang di anggap strategis dalam arti memperkuat relevansi,

memperkuat partisipasi masyarakat dalam keseluruhan kegiatan pendidikan, memperkuat preferensi nilai pada kemandirian dan kreativitas baik individu maupun kelembagaan, dan memperkuat dan mempertinggi kebermaknaan fungsi kelembagaan sekolah.

a. Memperkuat Sumber Daya Tenaga Kependidikan.

Agenda utama upaya memperkuat Sumber Daya Tenaga Kependidikan ialah dengan memperkuat sistem pendidikan tenaga kependidikan. Selama ini sekolah dan terutama guru-guru masih sangat terbatas dalam melakukan inovasi-inovasi pembelajaran. Di sisi lain, upaya untuk memperkuat kemampuan mengajar telah di upayakan melalui berbagai jenis penataran, pendidikan ataupun pelatihan-pelatihan. Melalui berbagai kegiatan tersebut diperkenalkan pula inovasi-inovasi pembelajaran.

Pasandaran, (2004 : 36-38) mengatakan bahwa kapasitas pendanaan sekolah menjadi salah satu implikasi penting dari implementasi otonomi daerah dan desentralisasi di bidang pendidikan. Dalam konteks itu, sekolah di tantang untuk mampu mengelola, mengembangkan, dan meningkatkan kapasitas pendanaannya sendiri. Di

sampling itu, pengalaman empirik menunjukkan bahwa selama ini pendanaan merupakan salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh semua sekolah baik swasta maupun negeri.

UPTD Pendidikan yang selanjutnya di sebut UPTD Pendidikan Kecamatan merupakan pelaksana sebagian urusan di bidang pendidikan di kecamatan yang di pimpin oleh seorang kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten melalui sekretaris.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan format deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono, (2008 : 1) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sedangkan format deskriptif kualitatif Menurut Burhan

Bungin (2007 :69) lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam, seperti permasalahan implementasi kebijakan pemerintah di masyarakat.

B. Tempat Penelitian.

Peneliti melaksanakan penelitian ini di UPTD Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara. Alasan peneliti melakukan penelitian di UPTD Kecamatan Loloda karena kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang kualitas pendidikannya masih sangat rendah oleh karena peran pemerintah yang kurang proaktif dalam pembangunan di bidang pendidikan.

C. Populasi dan Sampel.

1. Populasi.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya

2. Sampel.

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti (Suharsimi Arikunto, 1997 : 107). Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dengan perbandingan

tertentu, maka teknik pengambilan sampel yang di ambil adalah 1 orang Camat, 2 orang Pegawai Kecamatan, 1 orang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), 2 orang Pegawai UPTD, 5 orang Kepala Sekolah, 5 Orang Guru, 5 Orang Siswa, dan 4 Orang Masyarakat.

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Peran Pemerintah dan Meningkatkan Mutu Pendidikan. Secara operasional variabel-variabel tersebut di definisikan sebagai berikut :

Variabel Independen yaitu Peran Pemerintah Kecamatan. Artinya fungsi yang dimiliki oleh eksekutif dalam upaya mencapai tujuan, upaya pencapaian tujuan.

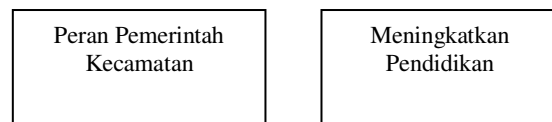
Variabel Dependen yaitu Meningkatkan Pendidikan. Artinya suatu proses untuk menjawab tantangan Sumber Daya Manusia untuk dapat bersaing dalam era globalisasi yang berkenaan dengan persaingan tehknologi informasi dan komunikasi dan pendidikan global.

E. Rancangan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya maka desain penelitian mengacu pada Variabel Penelitian dan Definisi Oprasional

Variabel yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1.Desain Penelitian



F. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan instrumen sebagai berikut :

Observasi (Observation), yaitu pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian.

1. Wawancara (Interview), yaitu teknik pengumpulan data yang di gunakan peneliti untuk mendapat keterampilan-keterampilan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterampilan pada si-peneliti. Wawancara ini dapat di pakai untuk melengkapi data yang di peroleh melalui observasi.
2. Angket (Kuesioner), yaitu teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan

jawaban atau tanggapan dari informasi yang di perlukan oleh peneliti (Mardalis, 2004 : 63-67).

G. Teknik Analisis Data.

Karena penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif maka teknik analisis data yaitu untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah terkumpul (Sugiyono, 2009 : 38).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Informan.

Dalam penelitian ini karakteristik responden yang dikemukakan adalah jenis kelamin, umur, pekerjaan dan pendidikan. Berikut ini karakteristik responden diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.

| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Frekuensi | Persentase (%) |
|---------------------|---------------|------------------|----------------|
| 1. | Laki-Laki | 20 Orang | 80 % |
| 2. | Perempuan | 5 Orang | 20 % |
| Total Jumlah | | 25 Orang | 100 % |

Sumber: Data Olahan 2012.

Dari data dalam tabel 5.1 di atas menunjukan responden di dominasi oleh laki-laki yaitu 20 orang (80%) dan

perempuan 5 orang (20%).Selanjutnya akan di gambarkan dalam tabel karakteristik responden berdasarkan umur.

B. Deskripsi Hasil Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan peranan pemerintah dalam upaya meningkatkan pendidikan di Kecamatan Loloda, dimana sasaran penelitian ini terfokus pada UPTD Kecamatan Loloda yang merupakan mitra kerja pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan secara umum.

C. Pembahasan.

Dalam Meningkatkan Kualitas dan Mutu Pendidikan maka hal utama yang sangat penting untuk di lakukan adalah proses belajar.Belajar pada dasarnya adalah sebuah proses untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan. Namun dalam kenyataannya ternyata tidak semua proses belajar berhasil.

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikanmengalami masalah-masalah yang prinsip. Masalah yang prinsip inilah yang disebut sebagai penyebab turunnya kualitas pendidikan di ngara kita. Hal ini merupakan hambatan dalam mencapai hasil pendidikan yang maksimal dan efisien.Setiap siswa dalam

mencapai sukses belajar, mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada siswa yang dapat mencapainya tanpa kesulitan, akan tetapi banyak pula siswa mengalami kesulitan, sehingga menimbulkan masalah bagi perkembangan pribadinya.

Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sejumlah pernyataan dari para Responden melalui penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan. Sejumlah pernyataan yang disebutkan bahwa dalam hal meningkatkan pendidikan di Kecamatan Loloda masih terlihat kurang baik. Berikut adalah penuturan para Responden yaitu sebagai berikut:

S.K (Siswa SMP Negeri 1 Loloda) mengatakan bahwa dalam meningkatkan pendidikan di Kecamatan Loloda masih kurang baik karena masih kurangnya tenaga pengajar. Buktinya ada guru yang memegang pelajaran lebih dari satu sehingga kami rasa bahwa apa yang dilakukan untuk peningkatan pendidikan di kecamatan Loloda masih rendah. Selanjutnya M.D (Guru SD Negeri Buo) mengatakan kurang baik karena masih banyak para siswa-siswi yang selalu bolos oleh karena itu saya boleh katakan bahwa untuk peningkatan pendidikan perlu adanya evaluasi. Lebih lanjut di katakan oleh F.P yang adalah Siswa SD Negeri

Buo bahwa peningkatan pendidikan di kecamatan Loloda kurang baik karena masih banyak guru yang honorer, oleh sebab itu kami berharap kedepan biarlah para guru yang ada di kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat semuanya Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kemudian L.K (Siswa SD Negeri Buo) mengatakan kurang baik karena masih banyak para siswa yang kurang serius ketika menerima pelajaran sehingga kualitas pendidikan di kecamatan kami masih rendah (Tabulasi Data Hasil Penelitian, Tabel 5.6 hal 69-71).

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian dari hasil analisa data penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan adanya implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan, pada dasarnya peran pemerintah kecamatan Loloda dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan lebih memahaminya sehingga pekerjaan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik sehingga pemerintah bertanggung jawab untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Berdasarkan hasil penelitian dapat dinilai bahwa peran pemerintah kecamatan dalam meningkatkan pendidikan di kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dapat berjalan dengan baik walaupun dilapangan masih terdapat banyak kendala dan juga keterbatasan sarana prasarana pendidikan, sehingga penulis sampaikan pada kesimpulan bahwa keberhasilan peran pemerintah kecamatan dalam menjalankan pendidikan sudah berjalan dengan baik walaupun belum terlalu maksimal dapat di laksanakan.

B. Saran.

Lewat penulisan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan beberapa hal demi penyelenggaraan pendidikan kedepan, di mana bahwa:

1. Implementasi peran pemerintah dalam meningkatkan pendidikan di Kecamatan Loloda harusnya dalam setiap tahapan program yakni perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan, seharusnya ditekankan pada pentingnya pemberdayaan pendidikan masyarakat dalam upaya memandirikan masyarakat. Untuk itu, para pelaku baik di Kecamatan maupun di Desa, harus benar-benar

memahami seluruh tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur, dan mekanisme peningkatan mutu pendidikan serta berkoordinasi dengan baik agar semuanya dapat dilaksanakan secara benar dan konsisten sehingga pembangunan di bidang pendidikanpun dapat berjalan efektif dan efisien.

2. Respon masyarakat terhadap Implementasi Pendidikan di Kecamatan Loloda harus berjalan dengan baik, karena keterlibatan masyarakat dalam memajukan pendidikan sangatlah penting. Begitu juga dengan Pemerintah, karena pada dasarnya masyarakat sangat bergantung pada pemimpinnya dalam hal ini Pemerintah yang di mulai dari Desa / Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten / Kota, Provinsi, maupun Pemerintah Pusat. Untuk itu, peran aktif dari pemerintah dalam hal sosialisasi, merekrut, bahkan perlu memfasilitasi segala pertemuan atau rapat yang di lakukan karena sangat diperlukan untuk menunjang keaktifan masyarakat dalam berpartisipasi untuk dapat berperan aktif dalam meningkatkan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmat H. Abu dan Uhbiyati Nur, 2007.
Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto Suharsini, 1997. Prosedur Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- B. Suryosubroto, 2010. Beberapa Aspek Dasar - Dasar Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin H.M. Burhan, 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dal Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dewey John, 2002. Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Inu Kencana Syaifi'ie. 2005. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.